



TINGKAT ANCAMAN MILITER DI WILAYAH REGIONAL INDONESIA DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PERTAHANAN NASIONAL DALAM MENYIKAPINYA PADA PERIODE 1990-2008

LEVEL OF MILITARY THREATS IN REGIONAL AND THE NATIONAL DEFENSE BUDGET POLICY IN THE PERIOD OF 1990-2008

Posma Sariguna Johnson Kennedy
posmahutasoit@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia
Jakarta, Indonesia

Abstract

This paper would like to see the government responds to the military threats that facing Indonesia from its strategic environment, through its defense budget policy. Single equation, formed to capture the military threats to national defense budget. The model developed are from Smith Military Demand Model. The estimation result is that the level of threat have influence on the defense budget. Indonesia must remain vigilant, because of the military rising of other countries. The strategic environment situation can be suddenly rise the escalation of threat.

Keywords: International Economics, Defense Economics, Military Threats, Defense Budget.

1. Pendahuluan

Pengembangan kekuatan militer selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber daya, termasuk sumber dana nasional. Keberadaan kekuatan militer untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan selalu berhadapan dengan pilihan prioritas kebijakan nasional yang lain. Penguatan kekuatan militer sebagai komponen utama pertahanan adalah melalui langkah-langkah mobilisasi, ekspansi atau perluasan kekuatan militer dan peningkatan kemampuan tanggap/responses. Modal penting dalam pengembangan semua itu adalah anggaran pertahanan. (Anggoro Kusnanto, 2004). Salah satu unsur utama dalam rumusan strategi pertahanan adalah rumusan mengenai jumlah anggaran pertahanan negara. Selain postur dan struktur pertahanan, komponen anggaran menjadi sangat vital karena anggaran adalah salah satu kunci dari implementasi total kekuatan negara dalam gelar kekuatan senjata. (Chrisnandi, Yudhi, 2007).

Keamanan dari ancaman dalam dan luar negeri sangat penting untuk mendorong kelancaran perkembangan investasi dan inovasi. Lingkungan yang aman akan mendorong investasi dalam dan luar negeri sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi (Benoit, 1973; Deger, 1986). Militer yang kuat juga akan menyediakan posisi yang kuat bagi kepemimpinan negara dalam bernegosiasi dengan negara lain dalam bidang ekonomi, perdagangan atau keamanan itu sendiri (Ram, 1993; Heo, 1998).

Pada periode 1986-2000 di seluruh dunia terdapat tren penurunan akan pengeluaran pertahanan. Namun di Asia, pengeluaran pertahanan justru mengalami tren meningkat. Sebelum Asia mengalami krisis keuangan pada tahun 1997-1998, pengeluaran militer dari negara-negara Asia meningkat secara cepat. Bahkan setelah krisis hanya menurun sedikit dan kembali meningkat lagi pada tahun 2000. Meningkatnya pengeluaran militer ini tentunya meningkatkan eskalasi keamanan regional. Pada penelitian ini akan ditinjau keamanan regional lingkungan strategis Indonesia dari negara-negara tetangga di perbatasannya.

Blackwill (2003) menyatakan Asia telah kembali menjadi sentral bagi sistem internasional setelah lima ratus tahun. Hal ini dipacu oleh beberapa faktor yang penting, yaitu perdamaian yang cukup lama diantara negara-negara kekuatan utama Asia pada seperempat akhir abad 20 yang membentuk kondisi politik yang dapat menciptakan kemakmuran ekonomi; berhasilnya liberalisasi

ekonomi di dunia internasional yang membuat negara-negara Asia meningkatkan pertumbuhan ekonominya jauh di atas pertumbuhan global; dan adanya kepemimpinan yang baik sebagai kunci pada negara-negara Asia fokus pada pembangunan ekonomi, meluasnya perdagangan, dan peningkatan kemakmuran.

Disamping meningkatnya kemakmuran ekonomi, negara-negara Asia didera oleh berbagai isu keamanan, baik dalam bentuk tradisional maupun non-tradisional. Isu-isu penting banyak muncul seperti kesenjangan sosial ekonomi, ancaman ketersediaan energi, komunikasi garis laut yang aman, kemungkinan penurunan pariwisata akibat ancaman terror, dan lain-lain Asia pun rawan akan instabilitas, seperti adanya konflik perang antar warga, ketidakamanan, konflik etnis, perang-perang yang muncul secara temporer, dan terorisme telah merusak hubungan antara negara dengan lainnya. Asia mengalami tren meningkat menghadapi ancaman keamanan internal dan eksternal, perlombaan senjata, pemberontakan, konflik dalam negara dan antar negara, dan program-program modernisasi. (Blackwill, 2003).

Paper ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Indonesia menghadapi perkembangan situasi militer tersebut dalam menetapkan anggaran pertahanannya untuk merespon ancaman militer dari negara-negara di lingkungan strategisnya.

2. Tinjauan Pustaka

Bagi pemerintah negara-negara Asia, kekuatan persenjataan memainkan fungsi utama untuk menjaga keamanan internal. Dalam banyak kasus, negara-negara telah mengalami transisi menuju pendewasaan demokrasi, hal ini dapat menyebabkan perselisihan antar politisi, antar warga, antar etnik, antar agama, ketidakadilan social yang dapat menyebabkan *instability* dan *insecurity*. Dengan adanya perubahan politik dan lingkungan ekonomi, perlu adanya misi militer yang baru, tidak hanya dalam bidang anggaran, tetapi juga mengantisipasi ancaman dari luar termasuk ancaman keamanan lintas negara, seperti lalu lintas narkoba, migrasi illegal, penurunan kualitas lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan operasi perdamaian. (Smith dan Peterman, 2000)

Akibat adanya ketidakstabilan politik, keamanan internal, dan ancaman dari luar (*external threats*) kepada negara, telah menjadikan alasan secara umum bagi negara-negara di Asia untuk menyediakan sumber-sumber daya bagi pengeluaran militer. Pada kenyataannya, meningkatnya pengeluaran militer bergantung pada faktor-faktor yang bervariasi seperti eskalasi dari konflik, peperangan, revolusi, dan ideologi. Setiap negara akan menjaga kedaulatan wilayahnya dengan pertahanan negara seperti dengan penangkalan gangguan, menangkalkan setiap ancaman militer, melindungi dan menjaga keamanan batas-batas wilayahnya. Apalagi dengan adanya perubahan yang demikian cepat dan jumlah penduduk dunia terus bertambah, tentunya perebutan wilayah-wilayah ekonomi juga sering terjadi. Perebutan wilayah perbatasan dengan motif utama penguasaan sumber daya alam baik yang terbarukan (*renewable resources*) maupun tak terbarukan (*non-renewable resources*) perlu diwaspadai. Jika wilayah kedaulatan negara diganggu oleh negara-negara tetangga, maka keberadaan dan kehormatan suatu bangsa mengalami ancaman.

Indonesia memiliki posisi yang strategis dan merupakan jalur lalu lintas dunia yang sangat penting. Terletak diantara benua Asia dan Australia, serta Lautan Pasifik dan Lautan India. Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari 17.504 buah pulau besar dan kecil, memiliki sekitar 81.900 km garis pantai, serta 75 persen (5,8 juta km²) wilayahnya berupa laut. Wilayah Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, baik darat maupun laut. Wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia di Kalimantan dan Papua Nugini di Papua. Kawasan perbatasan kontinen tersebut tersebar di tiga pulau, empat propinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing wilayah memiliki karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda. Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Kawasan-kawasan perbatasan wilayah laut Indonesia umumnya berupa pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau. Diantara 92 pulau tersebut terdapat 12 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau-pulau tersebut merupakan titik terluar yang mempengaruhi luas wilayah teritorial Indonesia dan berpotensi menjadi konflik teritorial dengan negara tetangga.

Untuk melakukan sistem pengamanan diperlukan sarana prasarana pertahanan keamanan yang memadai. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk menunjang keamanan wilayah perairan merupakan suatu kendala, sehingga banyak ditemukan berbagai pelanggaran kedaulatan dan hukum laut nasional. Dalam melihat ancaman dari lingkungan strategis perlu dilihat kapabilitas militer yang dimiliki Indonesia dibandingkan negara-negara tetangganya. Berapapun besaran kapabilitas relatif militer dari kawasan regional Indonesia belum terlihat gesekan-gesekan yang signifikan antar negara, baik itu berupa peperangan maupun perlombaan senjata yang tajam. Dengan demikian asumsi yang dapat diambil dalam analisa kawasan adalah setiap negara dalam mengembangkan pertahanannya memiliki motivasi *fear hypothesis*.

Dari fenomena selama ini, motivasi *fear hypothesis* dapat diterima untuk kawasan regional Indonesia karena setiap negara memiliki pola perilaku yang hampir sama. Hipotesis ini memiliki asumsi : setiap negara merupakan unit politik yang paling penting dalam sistem internasional; memiliki ketidakpastian terhadap tekanan dari negara-negara lain; setiap negara dianggap memiliki cukup persenjataan yang *offensive* untuk membahayakan negara lainnya; walaupun demikian kebijakan luar negeri dari negara tidaklah dikarenakan untuk meningkatkan kekuatan, tetapi berdasarkan motivasi untuk mampu bertahan; karena itu pengeluaran militer merupakan fungsi dari rasa ketidakamanan suatu negara. Semakin tinggi tingkat ancaman (*level of threat*) terhadap keamanan suatu negara, semakin tinggi pula pengeluaran pertahanannya. (Castillo et.all, 2001)

Karena tidak terdapatnya otoritas tersentralisasi yang sangat besar dalam politik internasional wilayah, tidak terdapat pemerintah yang berdiri di atas pemerintahan lainnya. Pemerintah harus memastikan dirinya sendiri untuk memiliki kekuatan yang mampu melindungi keamanannya tanpa mengetahui kepastian dari tekanan negara-negara tetangganya. Itulah alasan mengapa negara harus meningkatkan kekuatan relatifnya. Negara-negara akan saling cemburu terhadap keseimbangan kekuatan (*the balance of power*) dari para anggota, dan selalui memata-matai negara lain melalui sistem internasional akan kemampuan ekonomi dan militernya. Selain itu penentu kebijakan memutuskan pada tingkatan yang tepat kebijakan keamanan dengan mengestimasi tingkat ancaman dari negara-negara lain.

3. Model Penelitian

Pengeluaran pertahanan ditentukan dari keseimbangan antara *opportunity cost* dan *security benefits* yang disediakannya. Model permintaan pengeluaran pertahanan yang dibentuk pada penelitian ini adalah berdasarkan modifikasi model neoklasik standar yang dikembangkan oleh Ron Smith (1995). Ron Smith membentuk model formal dengan menggunakan bentuk *Cobb-Douglas*, $W = C^\alpha \cdot S^{1-\alpha}$, yang ditransormasi monotonik menjadi :

$$W = \alpha \log(C) + (1 - \alpha) \log(S) \quad (1)$$

Untuk menggambarkan keamanan (*security*), diasumsikan negara tidak agresif tetapi menyiapkan diri menghadapi tetangga-tetangga yang mengancam (*threatening neighbor*) dari lingkungan strategis (*strategic environment*) sebesar H , maka keamanan merupakan selisih antara anggaran militer riil, M , dan anggaran militer minimal, M^* . Anggaran militer minimal diasumsikan sebagai persamaan linier dimana intersep merupakan strategi cadangan militer, sedangkan *slope*-nya merupakan efektifitas anggaran militer menghadapi ancaman dari lingkungan strategisnya. Persamaan *security* dapat dibentuk sebagai berikut :

$$S = M - M^* = M - (\beta_0 + \beta_1 \cdot H) \quad (2)$$

M^* menunjukkan, sebagian merupakan elemen yang tetap (β_0) yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan lawan tetapi merupakan cadangan militer untuk menghadapi serangan lawan, dan bagian lainnya adalah β_1 sebagai efektifitas dari pengeluaran militer dalam menghadapi ancamannya. Dengan demikian variabel M dan M^* inilah yang berperan dalam mempertahankan keamanan yang optimal.

Smith (1980, 1995) dan Anderton (1990, 1992) menjelaskan dua keadaan dari variabel strategis β_0 untuk mempertahankan *security* yang optimal, yaitu :

1. Jika dari model didapat $\beta_0 < 0$ maka strategi pertahanan yang dilakukan adalah strategi natural (*natural strategic defense*) dimana persepsi ancaman rendah.
2. Jika dari model didapat $\beta_0 > 0$ maka negara harus melakukan persiapan yang lebih untuk mengantisipasi ancaman eksternal yang meningkat, dimana persepsi ancaman adalah tinggi.

Anggaran militer yang mengoptimalkan *security* adalah:

$$M = \frac{1-\alpha}{P_m} Y + \alpha(\beta_0 + \beta_1.H) \tag{3}$$

Smith (1995) memperluas model dengan menurunkan variabel kelembaman dari anggaran militer. Cadangan kekuatan militer (termasuk didalamnya, perlengkapan, persenjataan dan sumber daya manusianya) didefinisikan sebagai penjumlahan depresiasi dari pengeluaran masa lalu, yaitu :

$$K_t = (1-\delta)K_{t-1} + M_t \tag{4}$$

Dimana δ adalah parameter untuk tingkat depresiasi. Depresiasi ini diasumsikan dalam konsep waktu damai (*peace time concept*), bukan pada masa perang dimana banyak terjadi pengrusakan. Persamaan akhir menjadi :

$$M_t = \alpha\beta_0\delta + (1-\alpha)\frac{Y}{P_m} + \alpha\beta_1\delta.H + (1-\alpha)(1-\delta)\left[M_{t-1} - \left(\frac{Y}{P_m}\right)_{t-1}\right] \tag{5}$$

Tingkat ancaman terlihat dari kapabilitas militer relatif terlihat ancaman yang dihadapi oleh Indonesia dari lingkungan strategisnya. Dengan motivasi *fear hypothesis*, negara-negara di kawasan akan berusaha melakukan penyeimbangan kekuatan karena tidak terdapat kekuatan dominan dari salah satu negara. Untuk itu dibentuk suatu indeks sederhana yang dapat menterjemahkan hal tersebut sebagai indeks keamanan dari ancaman militer atau SNI militer. Indeks keamanan ini akan dimasukkan sebagai variabel ancaman ke dalam model. Perhitungan tingkat ancaman militer atau SNI militer, secara sederhana adalah dengan melihat kapabilitas militer, baik dari personil tentara dan anggaran militer yang mencerminkan kebijakan pembelian persenjataan suatu negara dibentuk suatu angka kapabilitas militer relatif.

4. Pembahasan

Berikut ini diperlihatkan perkembangan tingkat ancaman yang dihadapi Indonesia dari tahun ke tahun di lingkungan strategisnya.

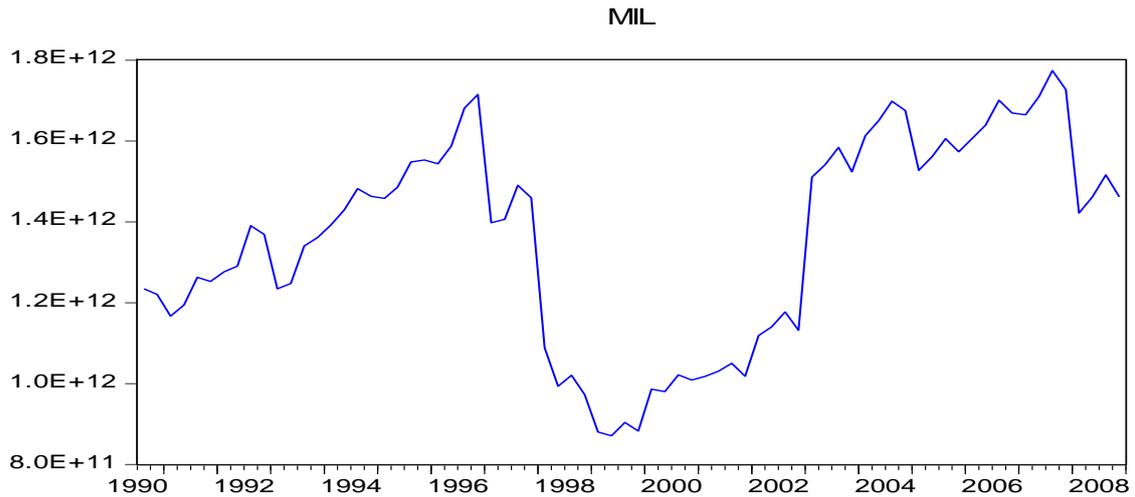
Tabel 1. Pergerakan Tingkat Ancaman dari Lingkungan Strategis Indonesia (SNI)

Tahun	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
SNI	0.16	0.15	0.15	0.13	0.15	0.14	0.12	0.12	0.14	0.19
Tahun	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
SNI	0.27	0.24	0.24	0.23	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.24

Sumber : hasil olah data dari World Development Indicator

Data di atas memperlihatkan bahwa sampai tahun 1998 sebenarnya peningkatan pertanian di kawasan tidak terlalu mengancam bagi Indonesia, karena terus menurun. Namun setelah krisis moneter terjadi peningkatan eskalasi ancaman walau beberapa kali terjadi penurunan, namun tidak lagi serendah sewaktu sebelum krisis.

Sesuai dengan motivasi suatu negara untuk mampu bertahan, maka pengeluaran militer merupakan fungsi dari rasa ketidakamanan suatu negara. Semakin tinggi tingkat ancaman (*level of threat*) terhadap keamanan suatu negara, semakin tinggi pula pengeluaran pertahanannya. Penentu kebijakan memutuskan pada tingkatan yang tepat kebijakan keamanan dengan mengestimasi tingkat ancaman dari negara-negara lain. Berikut ini diperlihatkan grafik besaran anggaran militer yang dikeluarkan Indonesia dalam kebijakan pertahanannya.



Gambar 1. Grafik Besaran Anggaran Militer Indonesia
Sumber: Departemen Keuangan Republik Indonesia

Secara absolut terlihat bahwa sejak 1998 pemerintah meningkatkan kembali anggaran pertahanannya setelah pada tahun-tahun sebelumnya mengalami trend menurun, namun pada tahun 2007 terlihat anggaran menurun kembali.

Namun demikian, dari hasil estimasi diperlihatkan dalam penyediaan anggaran militernya, Indonesia masih memperhatikan ancaman yang dihadapinya selama ini. Dari persamaan (5) dibentuk model empiris:

$$mil_t = c(1) + [c(2) * gdp\$_t] + [c(3) * sni_t] + [c(2) * c(4) * mil_{t-1}] - [c(2) * c(4) * gdp\$_{t-1}] \quad (6)$$

Dimana gdp_t adalah pendapatan domestik bruto riil pada periode t , mil_t adalah anggaran pertahanan riil pada periode t dan sni_t adalah tingkat ancaman eksternal pada periode t . Pada persamaan mil_t , besaran anggaran pertahanan dipengaruhi persepsi ancaman, tingkat ancaman yang digunakan adalah sni militer.

Hasil regresi yang diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Hasil Regresi Hubungan Besaran Anggaran Militer Indonesia terhadap Tingkat Ancaman Militer dari Lingkungan Strategisnya

Variable	Coefficient	Std. Error
C(1)	-3.15E+11*	1.80E+11
C(2)	5.581491***	1.820442
C(3)	1.39E+12**	5.78E+11
C(4)	0.172993***	0.054586
R-squared		0.878568
Adjusted R-squared		0.873364
S.E. of regression		9.09E+10
Sum squared resid		5.78E+23
Log likelihood		-1970.158
F-statistic		168.8186
Prob(F-statistic)		0.000000
Mean dependent var		1.36E+12
S.D. dependent var		2.55E+11
Akaike info criterion		53.35562
Schwarz criterion		53.48016
Hannan-Quinn criter.		53.40530
Durbin-Watson stat		1.994894

Sumber : hasil olah data menggunakan OLS

Estimasi di atas menggunakan metode *ordinary least square* dan telah lolos dari uji klasik autoregresi dan heteroskedastisitas. Namun untuk variabel mil_{t-1} dan mil , gdp dan gdp_{t-1} mengandung kolinieritas, tetapi tetap dibiarkan karena memang variabel tersebut yang akan dilihat di dalam model. Model masih dapat dinyatakan sebagai model yang BLUE. Seluruh variabel memiliki pengaruh yang signifikan pada penentuan pengeluaran militer. Hasil dari regresi persamaan adalah:

$$mil_t = (-3,15 * 10^{11}) + 5,58 * gdp + (1,39 * 10^{12}) * sni + 0,97 * mil_{t-1} - 0,97 * gdp_{t-1} \quad (7)$$

Analisa Sensitivitas

Model yang telah dibentuk memiliki dasar asumsi yang kuat terhadap *fear hypothesis* serta berlaku pada kawasan yang tidak terlibat dalam peperangan dan perlombaan senjata. Jika situasi kawasan tidak memenuhi asumsi tersebut maka model harus disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang pertama kali diubah adalah dalam pembentukan kapabilitas militer relatif. Kapabilitas ini merupakan rata-rata tertimbang dari kapabilitas personil (yang diproksi dari jumlah tentara) dan persenjataan (yang diproksi dari besar anggaran militer). Misalnya, jika yang terjadi di kawasan adalah perlombaan senjata, maka rata-rata tertimbang dari kapabilitas persenjataan memiliki porsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapabilitas personil.

Model ini dibentuk berdasarkan ancaman dari negara-negara di lingkungan strategis secara rata-rata. Jika terdapat satu negara yang lebih dominan sangat mengancam, maka tingkat ancaman dalam model dapat diasumsikan hanya berasal dari satu negara saja dimana ancaman dari negara-negara lain dianggap tetap atau tidak mengancam.

Berdasarkan model dengan asumsi-asumsi yang dibentuk dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu standar tingkat ancaman bagi Indonesia apakah indeks keamanan (*security need index*) telah melebihi dari yang seharusnya. Untuk melihat ini maka perlu dilihat indeks ketika ancaman Indonesia adalah nol. Berdasarkan persamaan (2) efektifitas dari suatu anggaran terlihat dari variabel β_1 . Jika anggaran militer lebih efektif maka ancaman terhadap suatu negara akan lebih kecil. Untuk itu perlu dilihat model dari anggaran militer dan anggaran militer efektifnya.

Jika diasumsikan hanya variabel tingkat ancaman yang berubah, sedangkan variabel lain dianggap tetap, maka dapat ditentukan elastisitas anggaran militer terhadap tingkat ancamannya. Model dapat dituliskan sebagai :

$$mil_t = (-3,15 * 10^{11}) + (13,9 * 10^{11}) * sni \text{ maka} \\ \varepsilon = \frac{\partial M / M}{\partial E / E} = [(13,9 * 10^{11}) / (10,75 * 10^{11})] = 1,3 \quad (8)$$

Terlihat bahwa pengeluaran militer Indonesia elastis terhadap tingkat ancaman dari lingkungan strategis. Jika tingkat ancaman meningkat 1% maka anggaran militer Indonesia meningkat sebesar 1,3%.

Selain melihat elastisitas tingkat ancaman terhadap pengeluaran militer, dari hasil estimasi dapat juga ditentukan efektifitas anggaran militer minimum Indonesia. Dengan menggunakan model :

$$M^* = \beta_0 + \beta_1 \cdot E \quad (9)$$

dimana $\beta_0 = 3,8 * 10^{11}$ dan $\beta_1 = -0,3 * 10^{12}$, persamaan anggaran militer efektif menjadi :

$$mil_t^* = 3,8 * 10^{11} - (3 * 10^{11}) sni \quad (10)$$

Dapat diterangkan dari persamaan di atas, meningkatnya satu unit ancaman akan menurunkan efektifitas dari anggaran militer dengan elastisitas :

$$\varepsilon = \frac{\partial M / M}{\partial E / E} = [(-3 * 10^{11}) / (0,8 * 10^{11})] = -3,75 \quad (11)$$

Dengan demikian peningkatan 1% tingkat ancaman menurunkan efektifitas anggaran militer sebesar 3,75 %. Walaupun penurunan efektifitas sebesar saat ini anggaran militer belum mengkhawatirkan karena masih dapat ditutupi oleh *output* pengeluaran militer awal (yang telah dimiliki sebelumnya). Namun jika nilainya telah melebihi, negara Indonesia memiliki preferensi yang tidak aman lagi.

Untuk melihat ini, dari kedua persamaan di atas, dimisalkan ancaman Indonesia adalah nol, maka dapat dituliskan kembali sebagai :

$$S = M - M^* = mil_t - mil_t^* = 0, \text{ sehingga : } (-3,15 * 10^{11}) + (13,9 * 10^{11}) * sni = 3,8 * 10^{11} - (3 * 10^{11}) * sni$$

$$sni = 6,95/16,9 = 0,4 \quad (12)$$

Dengan demikian ketika indeks keamanan Indonesia telah melebihi 0,4 maka perlu berhati-hati dan penyesuaian anggaran militer harus segera dilakukan secara signifikan. Peneliti menyebut titik ini sebagai indeks *peace point*, dimana Indonesia akan tetap memiliki preferensi yang aman jika indeks keamanannya tidak melebihi 0,4 karena elastisitas anggaran militer dan modal militer yang telah dimiliki sebelumnya masih mampu mengimbangi perubahan ancaman.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas terlihat bahwa Indonesia dalam periode 1989-2008 masih dalam preferensi aman karena tingkat keamanannya masih berada di bawah indeks *peace point*-nya. Walaupun demikian negara Indonesia haruslah tetap waspada karena variabel ancaman bukan saja berasal dari kemampuan anggaran militer sendiri tetapi sangat dominan dipengaruhi oleh kemampuan militer negara lain. Jika pada lingkungan strategis terdapat negara yang secara tiba-tiba meningkatkan kemampuan militernya maka bukanlah tidak mungkin terjadi peningkatan eskalasi ancaman, sehingga indeks keamanan meningkat sedemikian cepat melebihi *peace point*-nya. Ini terlihat mulai tahun 1998 terjadi peningkatan ancaman dengan cepat.

REFERENCES

- Anderton, Charles H. (1990) "Teaching Arm-Race Concept in Intermediate Microeconomics", *The Journal of Economic Education*, Vol.21, No.2, pp. 148-166.
- Anderton, Charles H. (1992) "Toward a Mathematical Theory of the Offensive/Defensive Balance", *International Studies Quarterly*, Vol.36, No.1, pp.75-99.
- Benoit, E. (1973). *Defence and Economic Growth in Developing Countries*. Lexington.
- Blackwill, R. (2003). "The United States, India and Asian Security", Conference paper presented to the *Institute for Defence Analysis*, 5th Asian Security Conference, New Delhi, India, January 27, 2003.
- Castillo; Lowell; Tellis; Munoz; Zycher. (2001). "Military Expenditures and Economic Growth", *RAND*, prepared for the United States Army, Aroyo Center.
- Chrisnandi, Yuddy. (2007). "The Political Dilemma of Defence Budgeting in Indonesia," *UNISCI Discussion Papers*, No.15.
- Deger, Saadet. (1986) "Human Resources, Government Education Expenditure, and the Military Burden in Less Developed Countries", *The Journal of Developing areas*, Vol.20 (1) : 37-48.
- (1986) "Economic Development and Defence Expenditure", *Economic Development and Cultural Change*, Vol.35 (1) : 179-196.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia (Ministry of Finance of the Indonesian Republic).
- Heo, Uk. (1998). "Modeling The Defense-Growth Relationship Around The Globe". *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 42 : 637-57.

- Ram, Rati. (1993). "Conceptual Linkages between Defense Spending and Economic Growth and Development: A Selective View". In *Defense Spending and Economic Growth*, edited by James E. Payne and Anandi P. Sahu. Boulder, CO: Westview.
- Smith P. & Peterman, T. (2000). "Report from the Conference on Evolving Roles of the Military in the Asia Pacific", Honolulu, Hawaii, *The Asia Pacific Center for Security Studies*. March 28-30.
- Smith, Ron P. (1980) "Military Expenditure and Investment in OECD Countries, 1954-1973", *Journal of Comparative Economics*, No 4, pp. 19-32.
- (1995) "The Demand for Military Expenditure". *Handbook of Defense Economic* Volume 1. Amsterdam : North Holland.
- World Development Indicator.